***PADE GELAHANG* SEBAGAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI SUBAK**

**(Studi Fenomenologi Pada Subak Multikultur di Desa Penarukan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)**



Dewa Kadek Darmada1,

Anantawikrama Tungga Atmadja1, Ni Kadek Sinarwati2

Jurusan Akuntansi Program S1

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail: { darmada.dewa@rocketmail.com,

anantawikramatunggaatmadja@gmail.com, kadeksinar20@gmail.com }

@undiksha.ac.id

**Abstrak**

*Subak* merupakan organisasi yang didirikan untuk mengelola sistem pengairan pertanian masyarakat adat Bali dan merupakan salah satu dari simpul budaya lokal di Bali. Subak multikultur merupakan fenomena yang langka dan unik, karena mampu mengitegrasikan *krama* dari dua latar belakang agama yang berbeda. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan tidak lepas dari kearifan lokal yang melandasi yang semakin menjadikan subak multikultur mampu mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Latar belakang inilah yang menjadikan *Subak Delod Sema* yang merupakan subak multikultur menarik dikaji untuk mengetahui 1) proses pengelolaan keuangan yang dilakukan di *subak Delod Sema*, dan 2) sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan *subak* yang didasarkan pada kearifan lokal *Pade Gelahang* yang berkembang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mentitikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data selanjutnya diolah melalui tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) analisis data dan penarik simpulan berdasarkan teori yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengelolaan keuangan di *Subak Delod Sema* melibatkan *prajuru subak*, dan *krama* yang ditunjuk sebagai panitia dalam kegiatan *subak*, 2) proses pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* dibagi menjadi dua kategori yaitu pengelolaan dana internal (*Ngusaba Desa*) dan dana eksternal *subak* (Hibah Gubernur Bali), 3) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana, perbedaan pengelolaan keuangan tersebut terletak pada bentuk laporan pertanggungjawabannya, dan 4) praktik akuntabilitas di *Subak Delod Sema* tidak lepas dari kearifan lokal *Pade Gelahang*, yang semakin mengintegrasi antar *krama subak* khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan.

**Kata Kunci:** *Subak*, akuntabilitas, *Pade Gelahang*, pengelolaan keuangan.

**Abstract**

*Subak* is an organization established to manage irrigation system of Balinese local society. *Subak* multicultural phenomenon is rare and unique, because it is able to integrate the manners of two different religious backgrounds. Sound financial management and transparency can not be separated from the local wisdom that underlies the increasingly multicultural make water control system is able to realize its financial accountability. This background makes *Subak Delod Sema* which is interesting multicultural examined to determine, to find out 1) financial management processes was done in *Subak Delod Sema*, and 2) financial management accountability system with control system based on local wisdom *Pade Gelahang* growth.

The study was conducted based on a quantitative design focusing on describing and interpreting human behavior. All data were obtained from deep interview, observation and documentation study. Henceforth an analysis was conducted by following three stages, such as 1) data reduction, 2) data presentation, and 3) data analysis and drawing conclusion based on a predetermined theory.

The results indicated that: 1) the process of financial management in *Subak Delod Sema* involve *subak* members, and manners were appointed as a committee in the activities of *subak*, 2) the financial management of *Subak Delod Sema* divided into two categories, namely the management of internal funds (*Ngusaba Desa*) and external funds *subak* (Grant Governor Bali), 3) accountability of financial management is done in a simple, differences in financial management lies in the form of accountability report, and 4) the practice of accountability in *Subak Delod Sema* not be separated from local wisdom *Pade Gelahang*, which increasingly integrates between *subak* members particularly in financial accountability.

**Keywords:** *Subak*, accountability, *Pade Gelahang*, financial management.

**PENDAHULUAN**

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai budaya tinggi yang dilandasi oleh falsafah agama dan telah dikenal hingga ke manca negara. Hingga saat ini, Bali masih menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Apabila dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Bali bekerja pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena Bali merupakan daerah agraris, sehingga sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Bali. Selain sebagai daerah wisata dan pusat investasi, Bali kini semakin berkembang. Salah satu simpul budaya yang menjadi daya tarik di Bali adalah keberadaan organisasi lokal di Bali, disamping simpul sosial budaya yang lain seperti *desa pakraman, dadia, sekaa*, dan desa dinas. Simpul-simpul sosial budaya ini sangat penting bagi perkembangan solidaritas sosial dan penyosialisasian budaya Bali.

Organisasi lokal yang ada di Bali berkembang seiring budaya lokal yang ada, yang semakin memberikan ciri khas dalam keberadaannya. Masyarakat Bali khususnya yang bekerja dalam sektor pertanian, tentunya memiliki organisasi lokal itu sendiri, yang sangat dikenal dengan sebutan *Subak*. Sistem *subak* merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. Seperti disebutkan oleh Pitana (1997) dalam Sunaryasa (2002), *subak* di Bali memiliki lima cirri meliputi (1) *subak* merupakan organisasipetani pengelola air irigasi yang memiliki pengurus dan peraturan organisasi *(awig-awig)* baik tertulis maupun tidaktertulis, (2) *subak* mempunyai suatusumber air bersama, berupa bendungan *(empelan* ataupun saluran utama suatu sistem irigasi), (3) *subak* mempunyai suatu areal persawahan, (4) *subak* mempunyai otonomi,baik internal maupun eksternal, dan (5) *Subak* mempunyai satu atau lebih pura yang berhubungan dengan per*subak*an.

Seluruh warisan budaya yang dikenal di provinsi Bali sudah tentu memiliki suatu nilai religius yang merupakan sisi menarik yang senantiasa ingin kita ketahui. Sama halnya dengan organisasi *subak* di Bali, kepentingan bersama dari *subak* dipadukan dengan nilai-nilai agama Hindu, yang menjadikan organisasi *subak* mempunyai nilai sosial-spiritual yang religius. Dengan kebersamaan dan sistem gotong royong yang diterapkan pada organisasi *subak*, serta ditambah juga dengan kearifan lokal konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan yang utuh didalam kehidupan manusia) yang dijunjung tinggi sebagai dasar pelaksanaan setiap kegiatan dalam *subak*, maka para pakar petani yang merupakan anggota *subak* beranggapan bahwa *subak* mampu mengambil peran untuk turut serta melestarikan lingkungan serta membantu mewujudkan kemajuan daerah. Hal ini dipandang dari filosofi *Tri Hita Karana* yang diemban, yang meliputi *Parhayangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan sesamanya) dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) (Griadhi, 1993).

Sesuai realita yang terjadi, adanya penonjolan sifat religius sesuai dengan ajaran Agama Hindu sebagai ciri khas *subak* telah menimbulkan persepsi seolah-olah *subak* adalah organisasi ekslusif, yang hanya dapat mengakomodasikan masyarakat petani yang beragama Hindu. Pada kenyataannya di Bali tumbuh dan berkembang berbagai agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen (Protestan maupun Katolik) dan juga Budha. Oleh karena itu dapat dipastikan di beberapa *subak*, masyarakat petani yang tergabung dalam keanggotaan *subak* ada yang berbeda agama. Dengan demikian *subak* bukanlah organisasi lokal yang ekslusif, karena ternyata mengakomodasikan petani yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda (Ratna, 2012).

Untuk mencegah timbulnya konflik dalam organisasi *subak* di Bali, perlu semakin meningktakan pemahaman akan perbedaan *nyama Bali nyama Selam*, yang sekarang ini sering kita dengar di tengah-tengah aktivitas sosial masyarakat. Mengadakan pembahasan bersama dan pertemuan dalam hal rapat desa menjadi penentu dalam menjalin keharmonisan. Dengan adanya dialog tersebut akan tercipta suatu toleransi kehidupan beragama yang sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana* yang melandasi *subak-subak* yang ada di Bali (Harjana, 1993:115).

Pernyataan di atas senada dengan Sumartana (2005:82) yang menyatakan bahwa sudah saatnya masyarkat bergerak dari pluralisme tertutup ke arah pluralisme organik yang membentuk kehidupan masyarakat baru yang merupakan kesatuan tetapi sekaligus bercorak ragam, menjadi sebuah masyarakat yang mengakui keberagaman. Masyarakat semacam ini membutuhkan kedewasaan warganya untuk menyusun kehidupan yang ditandai oleh kemampuan bertoleransi. Kemampuan demikian perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam *subak* yang anggotanya berbeda agama (subak multikultur).

 *Subak Delod Sema*, merupakan *subak* yang berada pada batas wilayah antara Kampung Jarat (Islam) dan warga Penarukan. Dalam organisasi *subak* ini tentunya *krama subak* berasal dari dua latar belakang agama yang berbada. Yang mana, keanggotannya tidak hanya berasal dari warga Hindu saja tetapi ada pula dari warga Islam.Maka dari itu, perlu mengintegrasikan keduanya dalam membangun integrasi antar anggota *subak*.

Keanggotaan dari *Subak Delod Sema* Desa Penarukan ini, sudah menjadi turun-temurun saat keberadaan nenek moyang orang Islam di Bali. Warga Islam bermukim di sebuah kampung yang dinamakan Kampung Jarat dan merupakan bagian dari Desa Penarukan. *Subak* yang multikultur menjadi fenomena yang unik sekaligus menarik jika kita kaji dalam hal integrasi dan proses akuntabilitas keuangan organisasi *subak* tersebut.

Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (dalam Mardiasmo, 2002:19), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas, sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (sistem *check and balances*) dalam organisasi profit motif dan non profit motif.

*Subak Delod Sema* Desa Penarukan dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Adapun alasan yang memotivasi dilakukannya penelitian pada organisasi *subak* di desa ini. *Pertama, Subak Delod Sema* Desa Penarukan terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari agama Islam, yang mayoritas berasal dari kampung Jarat. Ini menjadi sangat unik karena seperti yang kita ketahui, *subak* di Bali umunya beranggotakan warga yang beragama Hindu. *Kedua*, kepala atau *kelihan subak* adalah orang Hindu, ini tentunya rentan akan praktik kecurangan yang mana dalam aktivitas *subak* sering dijumpai yang namanya upacara *Ngusaba Desa* di Pura Subak.

Bagi anggota *subak* yang beragama Islam pastinya tidak ikut dalam pengelolaan keuangan untuk upacara tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada *subak Delod Sema* Desa Penarukan, sehingga praktik pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan menarik untuk diangkat. *Ketiga,* keberadaan kearifan lokal (*local wisdom*) yang secara turun temurun yaitu konsep *Pade Gelahang*, menjadi landasan dalam melakukan aktivitas per*subak*an di *Subak Delod Sema Desa* Penarukan. *Pade Gelahang* menjadi salah satu kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah organisasi *Subak Delod Sema* Desa Penarukan disamping *Tri Hita Karana*. *Pade Gelahang* mampu memupuk rasa kebersamaan, tanpa memandang latar belakang anggota *subak* dan menjadi akar dalam mempererat hubungan antar *krama subak*. Warga Hindu dan Islam setiap *paruman subak/*rapat *subak*, saling mengintegrasikan diri.

Pertanggungjawaban keuangan *subak* didasarkan atas filosofi ini, yang mana laporan keuangan *subak* menjadi tanggung jawab bersama, sistem pengelolaan baik mengenai pengeluaran saat upacara *Ngusaba Desa*, dana bantuan dari pemda untuk kegiatan *subak* yang bernuansa Hindu, pengelolaan pembagian air/tembuku, ekonomi produktif dan sebagainya juga harus diketahui oleh anggota subak yang beragama Islam. Cara pandang anggota *subak* dalam laporan keuangan *subak* sudah terintegrasi dengan memaknai keberadaan kearifan lokal yang melandasi pertanggungjawaban keuangan.

Merujuk pada hal tersebut di atas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan *subak* pada *Subak Delod Sema* Desa Penarukan merupakan hal yang menarik untuk diangkat dalam penelitian ini, dengan beberapa permasalahan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ni, antara lain: 1) sistem pengelolaan keuangan subak, dan 2) peran kearifan lokal *Pade Gelahang* dalam integrasi akuntabilitas keuangan subak.

**METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dititikberatkan pada deskripsi dan interpretasi perilaku manusia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer yaitu didapatkan langsung dari informan, serta sumber sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan atau artikel. Beberapa teknik dipergunakan secara triangulasi agar keabsahan data terjamin. Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara *purposive sampling* dan *snowball sampling.* Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data diolah dengan mempergunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Moleong (2005), yaitu: 1) Reduksi data *(data reduction)*, 2) Penyajian data *(data display)*, dan 3) Analisa data dan peenarikan simpulan *(verifikasi)* berdasarkan teori yang telah ditentukan. Atmadja dalam Lestari (2015:41) menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penarikan simpulan dan penyajian data merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir yang bersifat holistik dan sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sistem Pengelolaan Keuangan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan**

*Subak* merupakan suatu organisasi atau lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pengelolaan air (sistem irigasi) serta untuk mengatur sistem pengelolaan pertanian yang bersifat sosial, religius serta mandiri yang anggotanya terdiri atas petani yang berada pada suatu wilayah tertentu yang pelaksanaannya diatur berdasarkan *awig-awig.* Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga lokal *subak* bukan hanya sebatas pengaturan sistem pengelolaan air semata, tetapi *subak* juga mengkoordinir kegiatan yang bersifat sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Hal ini disebabkan karena *subak* merupakan organisasi tradisional yang berlandaskan atas *Tri Hita Karana*.

Sumber-sumber pendapatan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan berasal dari internal dan eksternal. Pendapatan dari internal meliputi peturunan dari para krama subak dan hasil pengembangan usaha ekonomi produkstif. Sedangkan sumber pendapatan eksternal berasal dari dana bantuan Pemda. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelihan Subak Delod Sema*, diperoleh informasi bahwa peturunan yang dibayarkan oleh *krama* tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya. Hal ini hanya akan terjadi pada saat dana kas subak memang sedang membutuhkan tambahan. Seperti hasil kutipan wawancara berikut ini,

kas *subak nike* (itu) *kan* berasal dari internal dan eksternal*.* Internalnya *nike* (itu)seperti *peturunan* (iuran) dan hasil simpan pinjam *nike* (itu)*. Subak Delod Sema nike kan medue* (Subak Delod Sema itu juga memiliki) koperasi tani*, kenten* (begitu)*. Yen peturunan masi nak sing* (jika iuran itu juga tidak) tentu *mayah* (bayar)*, yen*  (kalau) kas *ampun* (sudah) kurang *pas wenten upakara* (tepat ada ucapara) atau kegiatan lain*, nah drike wau nudukin kenten* (pada saat itu baru meminta iuran).

Dari pemaparan tersebut diatas, peturunan bukanlah sumber satu-satunya kas *Subak Delod Sema*. *Subak* ini juga memiliki sumber pendapatan internal lain yang berupa ekonomi produktif lewat usaha simpan pinjam. Koperasi *Subak Delod Sema* ini bergerak dalam simpan pinjam, yang mana koperasi ini bernama KUD Tirtha Luhur.

Selain itu, pendapatan yang berasal dari eksternal adalah bantuan atau hibah dari Provinsi Bali. Diketahui bahwa besarnya bantuan Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 30.000.000. Untuk tahun 2015, *Subak Delod Sema* sudah menganggarkan bantuan lewat proposal sebesar Rp 40.000.000.

Dalam pengelolaan keuangan baik sumber internal dan eksternal, tidak hanya *Petengen Subak Delod Sema* saja yang bekerja, tetapi ada pula pihak-pihak yang membantu, mislanya saja *Kelihan Subak* dan *Penyarikan*, serta persetjuan penggunaan uang dari *krama*. Kalau hanya dilakukan oleh Petengen, mungkin akan menjadi beban tersendiri dan menyulitkan, bantuan dan pengawasan dari prajuru lain serta *krama* juga perlu dilakukan. Misalnya saja dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran kemarin Tahun 2014, *Kelihan* dan *Penyarikan* juga turut membantu proses penyusunananya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *Penyarikan Subak Delod Sema*, Bapak I Wayan Rian, sebagai berikut,

dalam penyusunan laporan keuangan *nike* (itu), *tyang* (saya) ikut terlibat. Karena kan masalah nota, pencatatan administrasi *nike tyang* (itu saya) yang memegang. Jadi *petengen* (bendahara) juga kadang kurang paham, makanya *tyang* (saya) bersama *kelihan* (kepala) dan *krama* (anggota) lain ikut membantu. Biar juga *enggal masi* (cepat juga) selesai laporannya, karena kan selesai kegiatan laporan harus sudah jadi, *kenten* (begitu).

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan ini, didasarkan pada tida proses yang saling terkait. Mengingat keuangan *subak* juga menjadi keuangan yang perlu transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, mengingat *Subak Delod Sema* adalah *subak* yang multikultur dari dua latar belakang agama yang berbeda. Adapun tiga tahapan utama tersebut, yaitu:

1. tahap penerimaan kas dari berbagai pos pendapatan *Subak Delod Sema* Desa Penarukan yang melibatkan *prajuru subak*,
2. tahap pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai keperluan, dan
3. tahap pertanggungjawaban penggunaan dana tau kas *Subak Delod Sema* Desa Penarukan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Prajuru Subak Delod Sema*, diketahui bahwa pengelolaan dana bantuan pemerintah dibagi menjadi beberapa aspek. Adapun program-program yang rutin dilaksanakan di *Subak Delod Sema* yang mempergunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali adalah program Ekonomi Produktif (Simpan Pinjam), Dana Operasional *Pekaseh*, Dana Operasional *Prajuru* lainnya, Dana Penunjang Administrasi *Subak* dan Pembangunan Pemunduk Subak. Ekonomi Produktif merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk seluruh *subak* yang ada di Bali. Kebijakan program ekonomi produktif ditentukan oleh masing-masing *subak*. Untuk *Subak Delod Sema* sendiri melaksanakan program ekonomi produktif dengan melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam (SP). Seluruh *krama subak* berhak mendapatkan dana pinjaman, tetapi orang-orang yang akan diberikan pinjaman ditentukan melalui suatu *sangkep*. Untuk tahun 2014, dana yang dipergunakan dalam program simpan pinjam ekonomi produktif *Subak Delod Sema* sebesar Rp 5.000.000,00 dengan jumlah peminjam sebanyak lima orang. Jangka waktu pengembaliannya adalah selama satu tahun, dengan bunga yang sangat rendah. Program Ekonomi Produktif (Simpan Pinjam) untuk tahun 2014 telah diterima oleh krama subak, masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Adapun krama yang mendapatkannya sesuai hasil pararem, yakni Made Tangkas, Wayan Semara, Wayan Baghiyasa, Gede Sarba dan Wayan Kama. Menurut penuturan Bapak Nyoman Sugiarta, peningkatan ekonomi produktif ini sudah didasarkan pada hasil *pararem* dan *krama* yang mendapatkannya pun digilir, sehingga semua rata menerima.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Operasional *Prajuru* adalah pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional *subak*. Kegiatan operasional *prajuru* yang dilakukan oleh *krama* *Subak Delod Sema* pada tahun 2014 adalah gotong royong pembangunan fisik *subak*. Pengeluaran kas yang dilakukan adalah pembelian konsumsi untuk segenap *prajuru* dan *krama subak*, serta *banten* yang dihaturkan untuk memohon kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan operasional *prajuru*, ada juga biaya-biaya operasional lain seperti baiaya perjalanan dinas *prajuru,* biaya perjalanan *nunas tirta* ke Pura Ulun Danu Batur dalam rangka pelaksanan upacara *ngusaba*, biaya perjalanan sosialisasi pembangunan air bersih di Kantor Camat Sawan dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) lainnya.

Untuk dana administrasi subak dapat dari pengeluaran-pengeluaran selama operasional *Subak Delod Sema*, baik yang menyangkut hal-hal surat-menyurat,pembuatan proposal dan meterai yang diperlukan. Besarnya dana ini mencapai Rp 800.000 untuk tahun anggaran 2014 dan sudah diterima langsung oleh *Petengen Subak Delod Sema* sendiri.

Program selanjutnya yang dilaksanakan dengan mempergunakan Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Bali adalah pembangunan. Program pembangunan merupakan program dengan anggaran dana yang paling besar, yaitu 66,67% (Rp 15.000.000) dari jumlah keseluruhan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Bali. Setiap tahun, *subak* melakukan pembangunan sarana baru atau perbaikan terhadap sarana yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung kegiatan operasional *subak*, baik pembangunan yang mendukung di bidang pengelolaan sawah, seperti irigasi, pembangunan atau perbaikan yang bersifat religius (perbaikan pura), maupun pembangunan sarana pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan *subak*, seperti *balai subak*.

Dana eksertal *subak* selanjutnya adalah dana yang bersumber dari Hibah Gubernur Bali Tahun 2014, yang diajukan kemarin lewat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jumlah bantuan yang diberikan untuk tahun 2014 mencapai Rp 30.000.000. Berdasarkan keterangan yang didapat dari pengurus *subak*, diketahui bahwa pengelolaan sumber dana eksternal *subak* dari pemerintah provinsi dilakukan secara bersamaan.

Praktik yang bersih merupakan syarat terpenuhinya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dalam dimensi akuntabilitas publik yang disampaikan oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2000: 22). Menurut Ellwood akuntabilitas kejujuran lebih menyangkut pada penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait pada jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Selain itu, kepercayaan *krama* *subak* yang diberikan kepada *prajuru* *subak* dalam melakukan pengelolaan keuangan merupakan cerminan dari ajaran agama yang tidak boleh dipermainkan.

**Peran *Pade Gelahang* Sebagai Kearifan Budaya Lokal Dalam Integrasi Akuntabilitas Keuangan Subak di *Subak Delod Sema* Desa Penarukan**

*Subak* merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi formal lainnya. Sebagai suatu organisasi tradisional masyarakat adat Bali, *subak* tentunya memiliki kedekatan langsung dengan *krama subak,* karena senantiasa menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Meskipun hanya merupakan organisasi pengelola air yang sifatnya masih tradisional, tetapi *subak* senantiasa dapat menyiratkan unsur-unsur universal dan mendasar dari organisasi modern. *Subak* merupakan organisasi yang tanggap dengan perkembangan ilmu dan teknologi, oleh karena itu *subak* juga mampu mewujudkan citra oganisasi yang akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan proses pertanggungjawabannya.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Meskipun hanya merupakan organisasi tradisional dengan lingkup yang kecil, *Subak Delod Sema* senantiasa mengontrol kinerjanya agar dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama disampaikan oleh *Kelihan Subak Delod Sema* dalam kutipan wawancara berikut,

*yen tyang* (kalau saya) memandang *nggih*, pertanggungjawban keuangan *nike* (itu) sangat penting. Apalagi di *Subak Delod Sema* *niki* (ini) uang *kan* milik bersama, terus *wenten* (ada) dua agama yang berbeda *nike* (itu) kan rentan konflik. *Makane* (maka dari itu) masalah keuangan *tyang* (saya) selalu kordinasikan dan laporkan.

Pernyataan *Kelian* *Subak Delod Sema* diatas juga diperkuat lagi dengan pernyataan *Petengen Subak Delod Sema* berikut ini,

pertanggungjawbaan *nike* (itu) sangat perlu *nggih.* *Niki* (ini) berbicara uang kan sesuatu *sane keweh-keweh aluh* (sulit-sulit mudah), kalau dibilang. Tidak hanya organisasi *sane* (yang) besar saja, tetapi mangkin *sampun* (sekarang sudah) modern, *sami* (semua) tahu uang, kemana aliran uangnya, untuk apa-apa saja, sami *krama* (semua anggota) jeli akan itu. *Makane* (maka dari itu) pertanggungjawaban *niki* (ini) sangat penting, walau di *subak niki* (ini) hanya sederhana bentuk pembukuannya.

Berdasarkan pernyataan *Petengen Subak Delod Sema* diatas diketahui bahwa tujuan utama penyajian pertanggungjawaban kepada *krama* *subak* adalah untuk memperkuat unsur akuntabilitas dan transparansi yang disajikan di *subak*. Selain itu, pemahaman prajuru akan pembukuan yang masih terbatas, maka dari itu pengurus *subak* senantiasa berusaha menyajikan pertanggungjawaban dalam bentuk yang baik, meskipun tidak mengacu pada standar-standar akuntansi. Sistem pertanggungjawaban keuangan subak dibedakan menjadi dua, berdasarkan sumber dananya. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara, sebagai berikut,

kalau yang dari bantuan pemerintah laporannya dibuat sama dengan contoh dari lurah, lengkap, melampirkan kwitansi, laporan kegiatan, foto, nota, dan dijilid. Kalau laporan keuangan *Ngusaba Desa nike* (itu) lebih sederhana.

Pernyataan dalam kutipan wawancara diatas disampaikan oleh *Petengen Subak Delod Sema*, menjelaskan perbedaan antara kedua jenis laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus *Subak Delod Sema* dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan bersifat lebih lengkap, lebih rapi dan terstruktur. Sedangkan laporan pertanggungjawaban sumber dana internal *subak* dalam pelaksanaan Upacara *Ngusaba Desa* dibuat dengan lebih sederhana. Kedua jenis pertanggungjawaban keuangan yang berbeda tersebut tidak lantas membuat *krama* *subak* menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari *prajuru* *subak*. Rasa saling percaya yang tinggi membuat *krama* *subak* tidak pernah mempermasalahkan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pengurus *subak*. Rasa ini merupakan wujud dari kuatnya budaya lokal *Pade Gelahang.* *Pade Gelahang* telah menjadi landasan kuat, disamping *Tri Hita Karana*. Rasa memiliki bersama, saling menolong dan solidaritas yang tinggi di antara krama menjadi gambaran sosial yang ada di *Subak Delod Sema*. Dalam praktik akuntabilitas pun, *Pade Gelahang* muncul dalam setiap insan *krama subak*, baik antara *krama* Hindu maupun Islam. Mereka terintegrasi memaknai praktik akuntabilitas dalam *Subak Delod Sema* dengan landasan konsep *Pade Gelahang* tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh *Kelihan Subak Delod Sema*, Bapak Nyoman Sugiarta, sebagai berikut,

dalam pertanggungjawaban *subak driki* (disini) memegang budaya lokal *Pade Gelahang*. Jadi apapun yang disampaikan dalam *sangkep/ pararem* (rapat), *krama* (anggota) pasti selalu percaya. Begitu juga *prajuru* tidak menyalahgunakan kepercayaan *nike* (itu). Jadi semua pertanggungjawaban *nike* (itu), dianggap milik bersama. Bukan hanya baru prajuru yang bawa uang, *prajuru* saja yang mempertanggungjawabkan, tetapi semua *kram*a bersama-sama membantu *prajuru* dalam pertanggungjawabannya.

Meskipun memiliki perbedaan dalam sistem penyajiannya, *prajuru* *subak* senantiasa menjamin akuntabilitas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangannya. Terlebih lagi, kedua pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada seluruh *krama* *subak* dalam suatu *sangkep* (rapat) yang dilaksanakan setiap *buda wage* (rabu *wage*) atau hari-hari tertentu jika memang diperlukan *sangkep*.

Triyuwono (2000) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks *(complicated social interaction)*. *Subak Delod Sema* menciptakan esensi akuntabilitas dan transparansi dengan mempergunakan kearifan lokal yang berkembang. Budaya lokal yang ada di *subak*, dipandang mampu menjadi cermin dalam melaksanakan aktivitas per*subak*an. Sehingga itikad untuk melakukan hal-hal di luar *awig-awig* dan hasil *pararem* dapat diminimalisir.

Menurut Lestari (2014) Konsep akuntabilitas merupakan konsep yang dapat dikaitkan dengan spiritual. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki cakupan yang luas, bukan hanya pertanggungjawaban finansial, melainkan pertanggungjawaban yang lebih menekankan pada akuntabilitas intern dan ekstern. Bapak Dewa Putu Merta memberikan kepercayaan kepada pengurus *subak* atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Selain itu, mereka telah bekerja bersama-sama di *subak* selama puluhan tahun, jadi beliau merasa bahwa tidak akan ada kecurangan yang dilakukan oleh pengurus *Subak Delod Sema.*

*tyang nak tetep percaya nggih, yen di paruman masi tyang* (saya selalu percaya, di rapat juga saya) melihat kinerja *prajuru sami* (semua) bagus. *Driki kan pun wenten istilah Pade Gelahang* (disini kan sudah ada Pade Gelahang). Jadi *sami* (semua) saling percaya

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang diperlukan agar organisasi dapat mencapai predikat *good governance.* Lestari (2014:19) menjelaskan bahwa untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* perlu adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian halnya dengan *Subak* *Delod Sema*, tanpa disadari pengurus dan seluruh *krama* *subak* telah menerapkan keempat syarat *good governance* yang dijelaskan diatas. Asas transparansi tercermin dari terbukanya pengelolaan keuangan *subak* tabola terhadap seluruh *krama* *subak*. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan *Subak Delod Sema* dijabarkan dan diumumkan kepada *krama* *subak* secara keseluruhan dalam suatu rapat khusus yang dilaksanakan dengan agenda pembahasan pertanggunngjawaban pengelolaan keuangan *subak*.

Asas kedua yang diperlukan dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa akuntabilitas merupakan hal yang telah berhasil diwujudkan dan dijaga oleh pengurus *Subak Delod Sema*, oleh karena itu pengurus *subak* senantiasa mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh *krama* *subak*. Asas selanjutnya adalah asas kewajaran atau kesetaraan. Kesetaraan memiliki arti sama, dalam hal ini adalah kesempatan yang sama bagi seluruh bagian organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Tentunya asas ini sebagai wujud dari kearfian lokal *Pade Gelahang* yang sduah mendarah daging di antara *krama Subak Delod Sema*. *Subak* merupakan organisasi tradisional masyarakat adat bali yang memiliki unsur kebersamaan yang kuat. Setiap masalah senantiasa dipecahkan bersama melalui sistem musyawarah mufakat. Demikian halnya dalam pengambilan keputusan, seluruh *krama* memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapatnya untuk mencapai mufakat, tanpa memandang latar belakang *krama*.

*Pade Gelahang* sebagai salah satu landasan budaya lokal yang kuat, sebagai pijakan dari *Subak Delod Sema* juga menjadi pengontrol selanjutnya, karena tanpa kearifan ini mustahil *Subak Delod Sema* yang multikultur ini dapat ajeg dan berlanjutan. Sistem kontrol yang diberikan adalah sejauh mana krama *Subak Delod Sema* mampu memaknai konsep *Pade Gelahang* jika dikaitkan dengan praktik akuntabilitas di organisasi subak. Semakin tinggi pemahaman *krama*, maka kontrol dari kearifan ini dapat dikatakan sukses, dan begitu pula sebaliknya. Rasa kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan saling memiliki yang tinggi di antara krama subak telah menjadikan satu ikatan dari dua latar belakang agama yang berbeda yakni Hindu dan Islam, untuk selalu bergerak dalam satu visi dan misi subak yaitu dalam satu wadah *Pade Gelahang*.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan keuangan yang ada di *Subak Delod Sema* Desa Penarukan tidak melibatkan semua *krama subak*, melainkan hanya melibatkan beberapa *prajuru subak* dan *krama* yang menjadi panitia dalam setiap kegiatan di subak. Pihak-pihak tersebut yakni, *Kelihan Subak/Pekaseh*, *Penyarikan*/Sekretaris, *Petengen*/Bendahara, *Kelihan Tempekan*/ Kepala Bagian dan *krama* yang ditunjuk sebagai panitia dalam upacara *Ngusaba Desa* atau kegiatan lain di *subak*.

Proses penglolaan keuangan *Subak Delod Sema* dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengelolaan keuangan dana internal dan pengelolaan dana eksternal. Adapun yang dimaksud dengan penglolaan dana internal adalah pengelolaan dana yang bersumber dari *peturunan krama subak*, sedangkan penglolaan dana eksternal adalah pengelolaan dana bantuan yang berasal dari pemerintah. Kedua jenis pengelolaan keuangan ini dipertanggungjawabkan dengan cara yang berbeda. Pengelolaan keuangan dalam upacara *Ngusaba Desa* dilakukan secara sederhana, pengurus *subak* hanya mempertanggunjawabkan penglolaan keuangan dengan cara mengumumkan pemasukan yang diperoleh serta rincian biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan upacara. Pencatatannya dilakukan secara sederhana. Sementara, pengelolaan dana eksternal yang berasal dari Hibah Gubernur Bali dikelola dengan sistem yang lebih baik dan sesuai prosedur laporan pertanggungjawaban dari lurah. Laporan yang dibuat bersifat lengkap, mulai dari detail transaksi terkait, jumlah pengeluaran, bukti transaksi, absensi *krama subak*, hingga dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

Praktik akuntabilits yang ada pada *Subak Delod Sema* Desa Penarukan tidak terlepas pula dari perkembangan kearifan lokal budaya setempat, yakni konsep *Pade Gelahang. Pade Gelahang* yang berarti memiliki secara bersama-sama, telah mendarah daging dalam diri setiap diri krama subak. Sehingga baik *krama subak* Hindu maupun Islam, terintegrasi secara bersama-sama untuk selalu berbuat lebih baik dari organisasi. Selain itu, konsep *Pade Gelahang* telah menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama krama subak. Hal ini tentunya berimbas pada pertanggungjawaban keuangan *subak* yang dimaknai menjadi tanggung jawab bersama oleh *krama subak*.

Dalam penelitian terkait organisasi lokal subak selanjutnya untuk selalu melihat perkembangan kearifan budaya lokal selain *Tri Hita Karana*, juga perlu dipandang penting sebagai landasan dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2013. Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali)*.*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.2 No.1, hlm.24-26

Atmadja, N. Bawa. 2004. *Sumber Konflik Pada Desa Adat Multietnik Di Kabupaten Buleleng (Media Komunikasi FPIPS).* Singaraja: IKIP Negeri Singaraja

Griadhi, Wirtha. 1993. *Subak Dalam Perspektif Hukum. Dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali (Pitana ed.).* Denpasar: Upada Sastra

Harjana. 1993. *Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik*. Jakarta: Kansius

Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Akuntansi Program S1,Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Mardismo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Tasra, I Nyoman. 1982*. Awig-awig Subak Delod Sema* *Desa Penarukan,* (digubah terakhir oleh Dewa Putu Sumantri), 2000. Singaraja:\_\_\_\_\_